

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pasal 1 ayat 18 UU 33 Tahun 2004. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dihasilkan oleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil pendapatan tersebut merupakan bentuk peran serta secara riil dari pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah. Untuk pembangunan pembiayaan dalam penyelenggaraan tugas dan kewenangannya, maka perlu memaksimalkan sumber pendapatan agar pembiayaan daerah terus dapat dibiayai dari pendapatan asli daerah.

(Simanjuntak et al., 2013) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah representasi dari pendapatan yang dihasilkan oleh daerah. Pemerintah daerah harus lebih mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya agar dapat membiayai pengeluaran daerah dan tidak menghambat kegiatan ekonomi di daerah yang bersangkutan.

Menurut Olubukunola (2011) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan pemerintah daerah yang dihasilkan dalam wilayah yurisdiksinya. Pendapatan asli daerah yang tinggi menandakan otonomi daerah yang dilaksanakan berjalan dengan baik. Salah satu komponen yang sangat diperhatikan dalam menentukan tingkat kemandirian daerah dalam rangka

otonomi daerah adalah sektor Pendapatan Asli Daerah. Otonomi daerah sangat menuntut kemandirian pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber penerimaan yang terus menerus dipacu pertumbuhannya.

Menurut Alhusain et al., (2018) Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya.

Semakin besar pendapatan asli daerah akan membuat belanja daerah juga meningkat dan akan lebih banyak pengeluaran untuk kesejahteraan masyarakat (Adriani & Yasa, 2015). Sejalan dengan hal tersebut menurut Sasana, (2011) menyatakan bahwa semakin besar kemampuan daerah dalam mengumpulkan pendapatan asli daerah akan semakin longgar alokasi belanja daerah, sehingga terdapat hubungan yang positif antara pendapatan asli daerah dengan belanja daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri. Pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah, juga berasal dari daerah itu sendiri yaitu pendapan asli daerah serta pendapatan lain-lain yang sah (hasil

penjualan aset tetap daerah dan jasa giro). Pendapatan daerah dari pemberian pemerintah terdiri dari sumbangan dari pemerintah, sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan, dan pendapatan lain-lain yang sah.

Pemberlakuan pendapatan asli daerah karena diterapkannya sistem desentralisasi fiskal pada suatu daerah. Desentralisasi secara umum diartikan sebagai penyerahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah dalam hal penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah serta untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi daerah tersebut.

Optimalisasi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung dengan upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas layanan publik. Pendapatan sering tidak berjalan seperti yang diharapkan karena alasan keterbatasan kemampuan sumber daya yang dimiliki dan seringnya rotasi dan mutasi pemerintah yang berakibat pada banyaknya program-program strategis yang tidak berjalan dengan semestinya. Sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi dan rendahnya pendapatan asli daerah. Disatu sisi ada daerah yang sangat kaya karena memiliki pendapatan asli daerah yang tinggi dan sisi lain ada daerah yang tertinggal karena memiliki pendapatan asli daerah yang rendah (Suandi, 2016).

Dalam upaya untuk memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional pemerintahannya. Berdasarkan hal di atas, dapat dilihat bahwasanya pendapatan asli daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja modal, karena adanya saling keterkaitan satu sama lain dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat guna melancarkan pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat diukur dengan uang karena kewenangan yang diberikan masyarakat dapat berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah adalah :

- a. Pendapatan Asli Daerah Yang Sah :
 1. Hasil pajak daerah
 2. Hasil retribusi daerah
 3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan
 4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- b. Pendapatan berasal dari pemberian pemerintah

1. Sumbangan dari pemerintah
2. Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan
3. Pendapatan lain-lain yang sah

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan tiga acara, yaitu:

- a) Intensifikasi, yaitu suatu upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dengan cara meningkatkan dari yang sudah ada (diintensifkan). Diintensifkan dalam arti operasional pemungutannya. Pengawasan (untuk melihat kebocoran), tertib administrasi dan mengupayakan wajib pajak yang belum kena pajak supaya dapat dikenakan pajak.
- b) Ekstensifikasi, yaitu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dengan cara mengembangkan subjek dan objek pajak.
- c) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yaitu merupakan unsur yang penting mengingat bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah pembayaran pajak dan redistribusi ini sudah merupakan hak dan kewajiban masyarakat terhadap negara, untuk itu perlu dikaji Kembali pengertian wujudlayanan masyarakat yang bagaimana yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

Pertumbuhan ekonomi adalah kondisi dimana suatu negara mengalami peningkatan produk domestik bruto (PDB) dan tingkat kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi secara ekonomi dilihat dari sisi permintaan (*demand*) yaitu dengan memperhitungkan komponen-komponen makro ekonomi berupa konsumsi, investasi, ekspor, dan impor. Sedangkan dari sisi penawaran (*supply*) dengan memperhitungkan nilai tambah setiap sektor dalam produksi nasional. Pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dengan menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk skala nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk skala daerah sebagai alat ukur pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menggunakan PDB dan PDRB sebagai indikator yang merupakan nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian. Tujuannya untuk meringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama periode waktu tertentu.

Sadono, (2010) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi mengukur keberhasilan dari

perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya yang ditandai oleh peningkatan kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa. Menurut (Sukirno, 2011) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan dalam produksi barang maupun jasa dalam suatu perekonomian yang mana pertumbuhan ekonomi ini menjadi salah satu indikator penting di dalam melakukan suatu analisis pembangunan ekonomi (Nuraini, 2017).

Menurut teori Neoklasik, pertumbuhan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti akumulasi modal, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi. Teori neoklasik menekankan pentingnya akumulasi modal, yaitu peningkatan investasi dalam bentuk modal fisik seperti pabrik, peralatan, dan infrastruktur. Pertumbuhan populasi yang sejalan dengan pertumbuhan tenaga kerja dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan adanya pertumbuhan populasi akan ada lebih banyak tenaga kerja yang tersedia untuk kontribusi pada produksi dan inovasi. Kemajuan teknologi dan inovasi dianggap sebagai faktor penting dalam teori neoklasik, kemajuan teknologi memungkinkan perbaikan dalam efisiensi dan produktivitas, serta menciptakan peluang baru dalam produksi dan konsumsi, inovasi yang baik dianggap sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.

Setiap negara mempunyai hak dalam mengelola keuangannya sendiri,

dalam hal mengelola keuangan daerahnya sendiri disebut dengan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah yang berlaku di Indonesia didasarkan pada UU No. 22 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 yang dijelaskan bahwa pemerintah daerah memisahkan fungsi eksekutif dengan fungsi legislatif. Berdasarkan fungsinya, Pemerintah Daerah (eksekutif) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (legislative) terjadi hubungan keagenan. Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang dijadikan pedoman Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik. Di Indonesia, anggaran daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pertumbuhan ekonomi didasari oleh tiga alasan sebagai tujuan dari ekonomi makro. Pertama, penduduk selalu bertambah. Kedua, permintaan dan penawaran harus selalu seimbang (*balance*) untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Ketiga, menciptakan pemerataan ekonomi (*economic stability*) melalui retribusi pendapatan (*income redistribution*) akan lebih mudah dicapai apabila pertumbuhan ekonomi tinggi. Ada beberapa faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah, yaitu:

1. Tanah dan kekayaan alam lainnya (SDM)
2. Barang-barang modal dan tingkat teknologi yang mencakup semua investasi baru dalam lahan, peralatan fisik dengan kemajuan teknologi
3. Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja melalui peningkatan

Kesehatan, Pendidikan dan keterampilan kerja, pertumbuhan populasi yang akhirnya menyebabkan pertumbuhan Angkatan kerja.

4. Sistem sosial dan masyarakat menentukan sampai dimana pertumbuhan ekonomi dapat dicapai, seperti sikap berhemat yang bertujuan untuk melakukan investasi, sikap bekerja keras. Hal ini sejalan dengan teori ekonomi klasik yang menitik beratkan pada modal dan tenaga kerja serta perubahan teknologi sebagai unsur baru.

3. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Belanja menurut PSAP No. 2 adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan menurut Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang, “Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas.

Belanja daerah dapat didefinisikan pula sebagai semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran yaitu belanja daerah langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang ada disuatu wilayah. Belanja daerah juga merupakan salah satu indikator yang penting dalam menilai kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Belanja daerah mengacu pada pengeluaran atau penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan wilayah tersebut. Belanja daerah menekankan pentingnya efisiensi dalam pengeluaran publik. Pemerintah daerah diharapkan menggunakan sumber daya secara efisien dan mengoptimalkan manfaat yang diperoleh dari setiap unit belanja yang dilakukan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap pengeluaran yang dilakukan memberikan dampak yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. Belanja daerah harus diselaraskan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan tingkat pemerintahan lainnya. Koordinasi yang

baik diperlukan untuk menghindari tumpang tindih, memaksimalkan efisiensi, dan mencapai sinergi dalam pelaksanaan program dan proyek.

Belanja daerah atau pengeluaran pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 155 ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan (2) menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari beban APBN. APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD berisi anggaran mengenai pendapatan dan rincian Belanja Daerah.

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antar pemerintahan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Struktur belanja daerah terbagi menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal. Sedangkan, belanja tidak

langsung meliputi belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada propinsi/kabupaten dan pemerintahan desa, dan belanja tidak terduga.

Belanja daerah merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah. Pengeluaran pemerintah pada awalnya harus di analisis berdasarkan pengeluaran fungsional, (Ferreiro et al., 2009). Pemerintah daerah sebaiknya melakukan identifikasi kegiatan mana yang benar-benar masuk skala prioritas menurut ukuran kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Menurut Kainde (2013) Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih (ekuitas dana) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja pemerintah daerah sebaiknya lebih mengutamakan untuk kepentingan masyarakat daerah agar tujuan pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat daerah dapat tercapai. Secara umum belanja dalam APBD dikelompokkan menjadi lima kelompok yaitu :

1. Belanja Administrasi Umum
2. Belanja Operasional
3. Belanja Modal
4. Belanja Transfer
5. Belanja Tak Tersangka

Berdasarkan konsep ekonomi makro, government expenditure (pengeluaran pemerintah) merupakan salah satu variable pembentuk Produk Domestik Bruto

(PDB) bersama dengan konsumsi masyarakat, investasi swasta dan ekspor. Kebijakan pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang merupakan salah satu wujud intervensi pemerintah didalam perekonomian untuk mengatasi kegagalan pasar (market failure).

B. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai pembanding atau penunjang penelitian ini dan juga sebagai inspirasi baru untuk peneliti. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Daerah sebagai acuan dalam penelitian ini.

Tabel 2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Baharu ddin, 2022)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kota Makassar	Hasil penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh pendapatan awal daerah terhadap belanja daerah kota Makassar tahun 2010-2019. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder berupa data time series untuk merealisasikan pendapatan awal dan belanja

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>daerah untuk kota Makassar periode pengamatan 2010-2019. Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif, regresi linear sederhana menggunakan Ordinary Least Square (OLS), uji parsial dan uji estimasi menggunakan software SPSS versi 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan awal daerah berpengaruh positif dan signifikan berpengaruh pada edisi daerah kota Makassar.</p>
2.	(Fauzan, 2022)	<p>Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota</p>	<p>Hasil dari penelitian ini, mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah kota Makassar melalui jumlah penduduk, dan juga untuk mengetahui pengaruh pendapatan perkapita terhadap pendapatan asli daerah kota</p>

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Makassar Melalui Jumlah Penduduk	Makassar melalui jumlah penduduk dari tahun 2000-2020. Berdasarkan regresi linear berganda, dapat diketahui hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Makassar melalui jumlah penduduk sedangkan pendapatan perkapita memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Makassar melalui jumlah penduduk.
3.	(Urip, 2017)	Analisis Potensi Asset Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Kota Jayapura	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1.051% dan perkembangan ekonomi mempunyai pengaruh positif dan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 3,709%.
4.	(Mayza et al., 2015)	Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel bebas yang terdiri dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kontribusi sektor pertanian, kontribusi sektor pertambangan, kontribusi sektor industri, kontribusi sektor perdagangan dan kontribusi sektor konstruksi secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
5.	(Siskawati, 2014)	Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hasil estimasi data panel dengan <i>Fixed Effect Model</i> secara parsial jumlah penduduk tidak berpengaruh secara signifikan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Pendapatan Asli Daerah Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau	terhadap pendapatan asli daerah disebabkan karena ada beberapa daerah yang memiliki laju pertumbuhan penduduk yang rendah selain itu seperti halnya dengan kabupaten Inhil dan kabupaten Kampar terjadi penurunan pertumbuhan pada komponen pajak daerah yang disebabkan oleh masih kurangnya kesadaran oleh para wajib pajak dan retribusi menunaikan kewajibannya. Namun analisis secara simultan.

C. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual penelitian merupakan pemahaman mengenai suatu fenomena yang menjadi dasar atau landasan berupa bagan yang menggambarkan hubungan antar konsep yang akan dikembangkan. Kerangka konseptual merupakan landasan dalam penelitian yang pada dasarnya mengidentifikasi hubungan antar variabel utama untuk menjawab masalah penelitian tertentu (Hermawan, 2009).

Kerangka konseptual bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan penelitian agar penelitian lebih terarah sesuai dengan tujuan (Fachturrozi, 2013). Hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tersebut menunjukkan hasil yang berbeda antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lain, namun secara garis besar menunjukkan kecenderungan pola hubungan yang sama. Pada bagian ini disertakan kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan-hubungan dan permasalahan mendasar mengenai penelitian ini. Dari permasalahan tersebut selanjutnya terbentuk rumusan masalah penelitian.

a. Hubungan Belanja Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Ferdiansyah et al., 2018). Pendapatan Asli Daerah dapat memberikan dampak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang merupakan kemampuan untuk menunjukkan bahwa daerah tersebut mampu memenuhi dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan daerah. Kemampuan daerah dalam meningkatkan potensi sumber pendapatan asli daerah dapat memberikan pengaruh tingkat pembangunan suatu daerah, dengan meningkatnya pendapatan asli daerah dapat memicu dan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi daerah sebelumnya. Peningkatan pendapatan asli daerah juga dapat mengoptimalkan dan memberikan pengaruh positif pada aktivitas sektor-

sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan perdagangan, sektor jasa, dan sektor lainnya.

Pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi dan daerah yang dimiliki suatu daerah melalui pendapatan asli daerah yang bersumber pada pendapatan daerahnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggap sebagai solusi dan juga alternatif sumber pendanaan daerah yang dipergunakan oleh suatu daerah sebagai pengeluaran berupa belanja daerah untuk melaksanakan pemerintahan dan Pembangunan yang dapat memperkecil ketergantungan daerah terhadap subsidi dari pemerintah pusat atau desentralisasi fiskal.

Berdasarkan BPS tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) yang dipaparkan secara berkala setiap tahunnya. Menurut Sasana (2011) mengemukakan bahwa semakin besar kemampuan daerah dalam mengumpulkan pendapatan asli daerah akan semakin longgar alokasi belanja daerah, yang dapat mengakibatkan hubungan antara pendapatan asli daerah dengan belanja daerah bersifat positif.

Apabila sektor-sektor ekonomi terjadi kenaikan, kemungkinan akan mempunyai pengaruh besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena beberapa sektor domestik dapat digunakan untuk mengukur atau mengestimasi pada peningkatan pendapatan asli daerah secara langsung.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah dalam mengumpulkan dana untuk kepentingan suatu daerah dalam membiayai kegiatan rutin maupun untuk Pembangunan

daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan dana yang diperoleh dari pendapatan asli daerah dalam mengatur pengeluaran daerah dan kepentingan Masyarakatnya. Semakin besar kemampuan daerah dalam mengumpulkan pendapatan asli daerah akan semakin longgar alokasi belanja daerah, sehingga terdapat hubungan positif antara belanja daerah dengan pendapatan asli daerah.

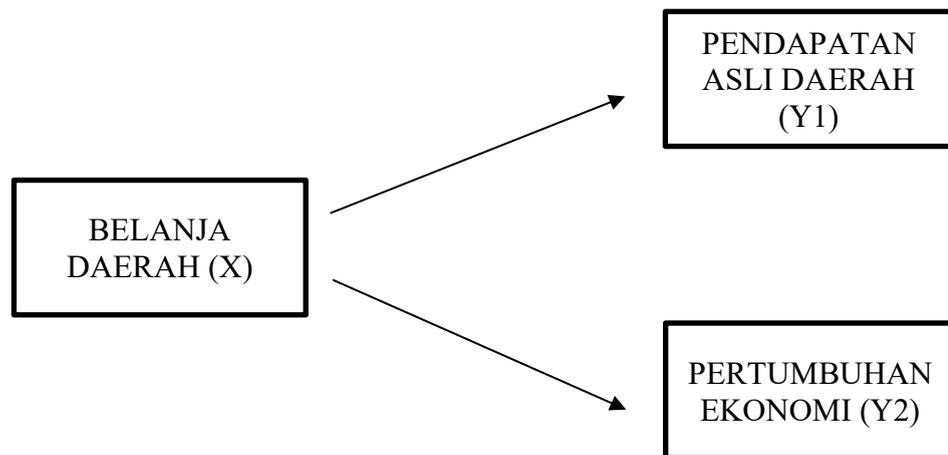
b. Hubungan Belanja Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi

Belanja daerah merupakan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik dan pembangunan. Besar kecilnya belanja daerah disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi yang mana apabila faktor tersebut dikelola dengan baik maka akan meningkatkan belanja daerah dan apabila belanja daerah meningkat maka kebutuhan akan kepentingan daerah juga akan meningkat serta membuat perekonomian menjadi lebih baik. (Račkauskas & Liesionis, 2013) meyakini bahwa pengeluaran yang tidak produktif menghambat Pembangunan ekonomi dan menghambat pertumbuhannya. Belanja daerah digunakan untuk mendanai segala urusan pemerintah menjadi kewenangan provinsi maupun kabupaten/kota yang telah diserahkan kepada kepala daerah masing-masing.

Salah satu indikator keberhasilan daerah dalam kesejahteraan masyarakatnya adalah dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan PDRB dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi selalu menjadi salah satu hal yang ingin dicapai oleh semua negara maupun daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan

peningkatan dalam produksi barang dan jasa ekonomi, dibandingkan dari satu periode ke periode lainnya. Hal ini diukur secara riil atau nominal disesuaikan dengan tingkat inflasi pada yang terjadi pada suatu daerah.

Berdasarkan dengan landasan teori di atas maka penelitian ini mencoba menganalisis beberapa faktor dan indikator yang dapat mempengaruhi yaitu belanja daerah (X) sebagai variabel independent, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui variabel dependent yaitu pendapatan asli daerah (Y1) dan pertumbuhan ekonomi (Y2).



Gambar 1 Kerangka Konseptual Penelitian

D. Hipotesis

Hipotesis penelitian disusun berdasarkan pemahaman proses, khususnya tentang media landasan dan dalil atau teori terkait dengan kasus atau fenomena yang menjadi objek penelitian. Pada hakekatnya penyusunan hipotesis menuntut pemikiran logis berbasis teori, dalil dan fenomena aktual

untuk menjawab pertanyaan penelitian (Badiger & Phil, 2014). Hipotesis penelitian ilmiah dibangun berdasarkan 3 unsur pokok, yaitu 1) teori yang dipakai dalam penelitian, terdiri dari teori utama (gazed theory), teori perantara (mid theory), dan teori aplikasi (applied theory); 2) dalil temuan penelitian terdahulu yang sejalan maupun yang tidak sejalan dengan teori; 3) fenomena hubungan atau pengaruh aktual dilapangan antara variabel independent terhadap variabel dependen.

Hipotesis menggambarkan dugaan secara singkat dan jelas tentang hubungan atau pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian (Abdullah, 2015).

Berdasarkan rumusan masalah, tinjauan teori, dan penelitian sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

1. Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar
2. Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Makassar